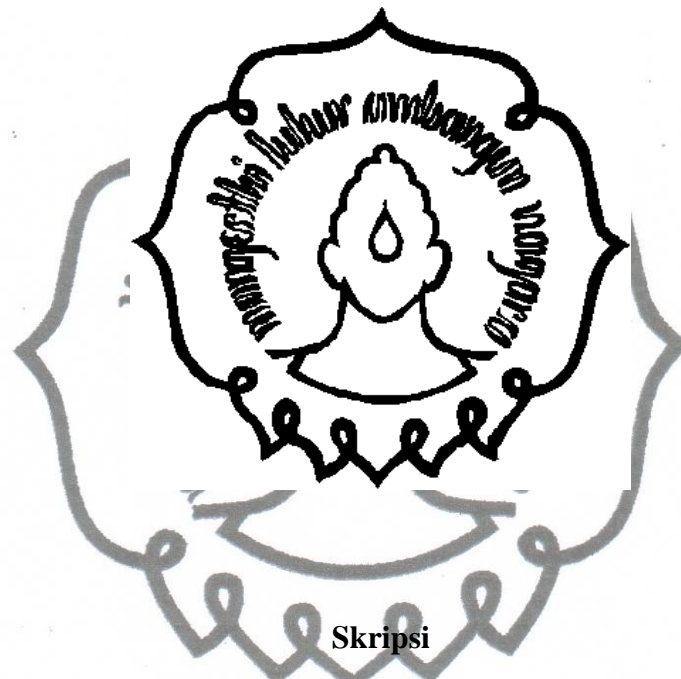


**pANALISIS PENGARUH MODAL BANK UMUM, DANA
PIHAK KETIGA, DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP
PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM
DI INDONESIA (TAHUN 2001:3 – 2009:5)**



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

PUJIYANTI

NIM. F1106010

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh pembimbing

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH MODAL BANK UMUM, DANA PIHAK KETIGA
DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP PENYALURAN KREDIT
PERBANKAN PADA BANK UMUM DI INDONESIA**

(TAHUN 2001:3 – 2009:5)

Surakarta, September 2010

Pembimbing



Drs. Joko Nugroho, M.E.

NIP. 196206301989031001

HALAMAN PENGESAHAN


Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, November 2010

Tim Penguji Skripsi

1. Sumardi, SE
NIP. 196209081987021004

Sebagai Ketua (.....)



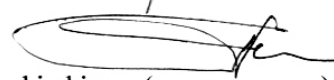
2. Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si
NIP. 196705231994031002

Sebagai Sekretaris (.....)



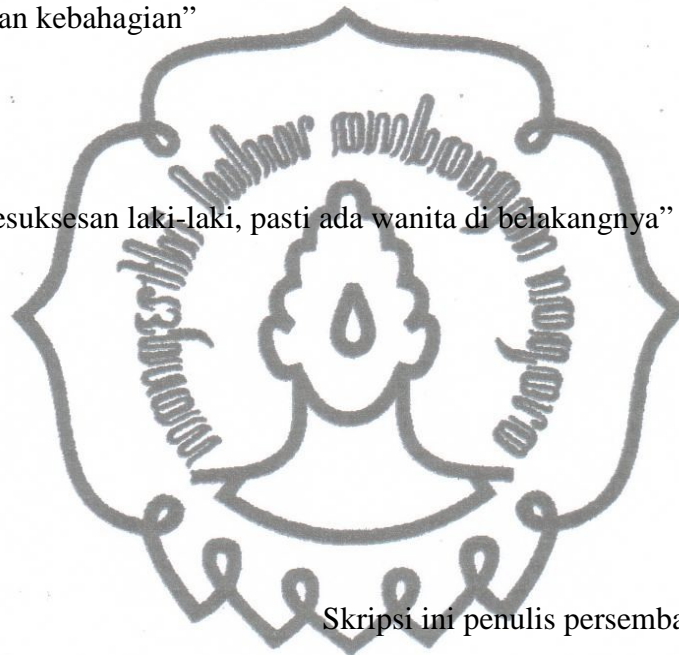
3. Drs. Joko Nugroho, M.E
NIP. 196206301989031001

Sebagai Pembimbing (.....)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jiwa pasti sepi tanpa teman, tapi hati akan mati tanpa iman. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan. Semalam adalah impian, hari esok semoga penuh dengan kebahagiaan”



(Penulis)

“Di balik kesuksesan laki-laki, pasti ada wanita di belakangnya”

(Penulis)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Allah Yang Maha Esa

Dan ku hadiahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku Tercinta
2. Kakak-kakakku
3. Temen-temen Ekonomi Pembangunan
4. Almamaterku

commit to user

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya penulis selalu diberikan kekuatan dan keteguhan iman dan kepercayaan diri sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PENGARUH MODAL BANK UMUM, DANA PIHAK KETIGA, DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM DI INDONESIA (TAHUN 2001:3– 2009:5)**.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dibalik penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang-orang luar biasa yang memberikan bantuan, petunjuk, dan bimbingan serta motivasi kepada penulis, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Joko Nugroho, M.E, selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak

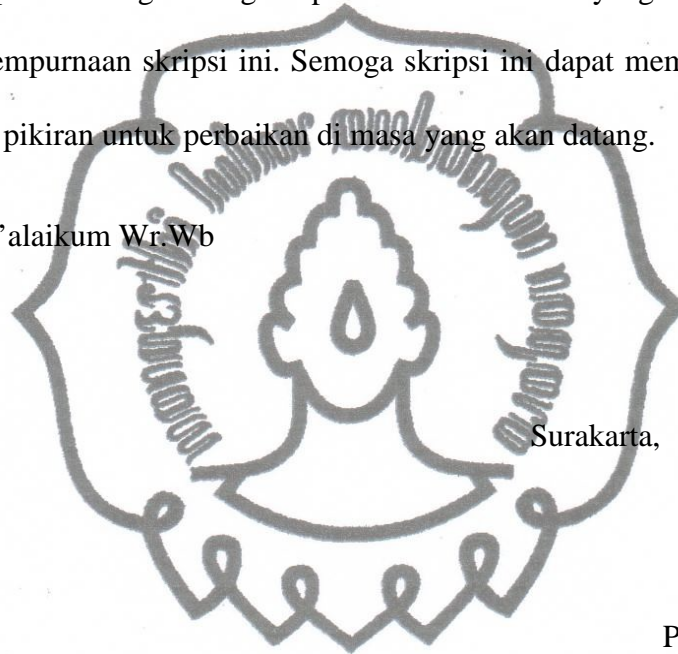
memberikan dukungan moril selama penulis berproses di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Dwi Prasetyani, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Mamiku tercinta yang tiada pernah berhenti memberikan kasih sayang dan doanya yang tulus. Terima kasih telah melahirkan saya di dunia ini. Untuk Papi semoga saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
6. Kakak-kakakku, Mas Sugeng, Mbak Nining dan Mas Min, Mas Edi, Mbak Endang yang telah memberikan aku dorongan, semangat, serta motivasi.
7. Keponakan-keponakanku, Dimas, Arjun, Imut, dan Vian yang telah menghiburku saat aku sedang gelisah.
8. Teman-temanku satu jurusan ekonomi pembangunan angkatan 2006 : Pipit, Nisa, Tisna, Wiwin, Vina, Ayu', Feni, Erma, Susan, Fetri, Yus, Hadi, Yohan, Anggun, Satrio, Hanif, Wawan, Febri, Agus, Dani, dan yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih kebersamaannya.
9. Teman-temanku kos Nurul Handayani (mbak Titin, Yunani, Hani, Joe, mbak Maya, mbak Ijun, mbak Rahma, mbak DJ, Risa, Kiki, Woro, mbak Watik, dan Mbak Licha) terimakasih atas do'a dan dukungannya.
10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi, terima kasih telah membimbing saya dan memberikan saya ilmu.

11. Staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, terima kasih telah melayani kami hingga kami beranjak keluar dari Fakultas Ekonomi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan sumbangan pikiran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Surakarta, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Perbankan	6
1. Pengertian Bank	6
2. Jenis Bank	7
a. Bank Umum	7
b. Bank Perkreditan Rakyat	10
3. Fungsi dan Tujuan Bank	11
4. Kebijakan Perbankan <i>commit to user</i>	12

5. Ketentuan Pokok Perbankan	13
6. Arsitektur Perbankan Indonesia	15
B. Perkreditan	16
1. Pengertian Perkreditan	16
2. Unsur-unsur Kredit	17
3. Tujuan Kredit	19
4. Fungsi Kredit	21
5. Jenis-jenis Kredit	24
a. Kredit Yang Diberikan Bank Indonesia	24
b. Jenis-jenis Kredit Perbankan Untuk Masyarakat	26
6. Kebijakan Moneter	30
7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penawaran dan Permintaan Kredit	33
C. Hubungan Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen	34
1. Modal (<i>Equity</i>)	34
2. Simpanan Dana Masyarakat	36
3. Tingkat Suku Bunga SBI	37
D. Penelitian Sebelumnya	38
E. Kerangka Pemikiran	39
F. Hipotesis	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Definisi Operasional Variabel	42
D. Metode Analisis Data	43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

commit to user

A. Gambaran Umum Perkembangan Perbankan di Indonesia	53
B. Analisis dan Pembahasan	59
1. Analisis Diskriptif	59
a. Perkembangan Kredit Perbankan	59
b. Perkembangan Modal Bank Umum	61
c. Perkembangan Dana Pihak Ketiga	62
d. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI	65
2. Analisis Induktif	67
a. Persamaan Regresi	67
b. Pengujian Persamaan Regresi	68
c. Interpretasi Ekonomi	75
BAB V KESIMPILAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Perkembangan Kredit Perbankan Tahun 2001-2009	59
TABEL 4.2 Perkembangan Modal Bank Umum Tahun 2001-2009	61
TABEL 4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2001-2009	64
TABEL 4.4 Perkembangan Suku Bunga SBI Tahun 2001-2009	66
TABEL 4.5 Hasil Perhitungan Uji MWD	67
TABEL 4.6 Hasil Olah Data Regresi Linier	67
TABEL 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	71
TABEL 4.8 Hasil Olah Data Uji Park	72
TABEL 4.9 Hasil Olah Data Uji Glejser	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Kredit Perbankan Di Indonesia	3
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	40
Gambar 3.1 Daerah Kritis Uji t	47
Gambar 3.2 Daerah Kritis Uji F	48
Gambar 3.3 Daerah Ho diterima dan ditolak dalam Uji Autokorelasi	51



ABSTRAK

PUJIYANTI

F1106010

**ANALISIS PENGARUH MODAL BANK UMUM, DANA PIHAK KETIGA,
DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP PENYALURAN KREDIT
PERBANKAN PADA BANK UMUM DI INDONESIA****(TAHUN 2001:3 – 2009:5)**

Jumlah kredit perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kredit perbankan ini besar kecilnya dipengaruhi oleh modal bank umum, dana pihak ketiga, dan suku bunga SBI. Masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor Modal Bank Umum, Dana Pihak Ketiga, dan Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap Kredit Perbankan di Indonesia. Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut: diduga faktor Modal Bank Umum dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Kredit Perbankan, sedangkan Suku Bunga SBI berpengaruh negatif terhadap Kredit Perbankan.

Penelitian ini menggunakan data *time series* dari tahun 2001:3-2009:5. Data diperoleh dari data Bank Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa secara individu semua variabel independen yaitu Modal Bank Umum, Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga SBI secara individual masing-masing variabel tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Perbankan pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan secara bersama-sama semua variabel independen yaitu Modal, Dana Pihak Ketiga, dan Suku Bunga SBI secara signifikan berpengaruh terhadap Kredit Perbankan pada tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka diajukan saran-saran yaitu, struktur Modal Bank Umum harus kuat untuk menopang kredit dalam jangka panjang, Dana Pihak Ketiga harus dijaga tetap naik agar ada kenaikan jumlah Kredit Perbankan. Agar dana pihak ketiga tetap naik perbankan dapat menawarkan produk-produk simpanan yang menarik minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dengan fasilitas dan kemudahan, selain itu suku bunga SBI harus dijaga agar tetap rendah, tidak terlalu tinggi agar kredit perbankan dapat disalurkan ke masyarakat dalam jumlah cukup besar.

Kata kunci: Kredit Perbankan, Modal Bank Umum, Dana Pihak Ketiga, dan Suku Bunga SBI. *commit to user*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam proses intermediasi, dana yang dikerahkan atau dimobilisasi oleh bank selanjutnya akan disalurkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang produktif. Kegiatan bank ini akan meningkatkan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara dan dapat mengurangi jumlah pengangguran (Suseno, Piter Abdullah, 2003:1).

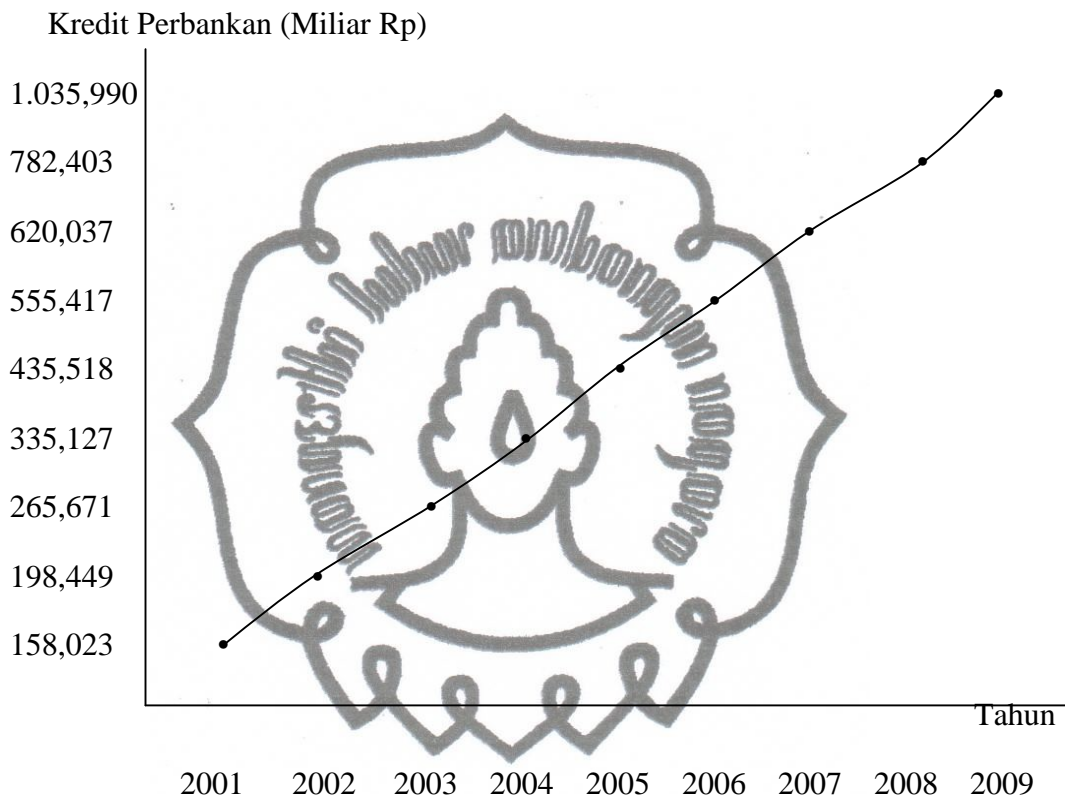
Akumulasi modal yang dihimpun lewat tabungan dan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang melalui institusi perbankan, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian secara makro. Bank-bank sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam hal penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sebagai perantara, pihak-pihak yang kelebihan dana, baik perseorangan, badan usaha, yayasan, maupun lembaga pemerintah dapat menyimpan kelebihan dananya di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan ataupun

deposito berjangka sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit konsumsi. Fungsi intermediasi baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tersebut memiliki kepercayaan terhadap bank (Suseno, Piter Abdullah, 2003: 6).

Modal atau dana yang dipakai untuk kegiatan usaha atau usaha perekonomian, salah satunya dapat diperoleh melalui kredit atau pinjaman dari lembaga perbankan. Kredit dikatakan berhasil mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik bagi pihak kreditur, debitur dan juga negara dengan adanya tambahan pajak (Budi Untung, 2000: 4). Untuk mendorong masyarakat agar menyimpan dananya kembali ke perbankan nasional, Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI yang segera diikuti dengan naiknya suku bunga deposito untuk seluruh jangka waktu.

Dalam sistem perekonomian saat ini, perbankan memang bukan merupakan satu-satunya sumber permodalan bagi investasi, namun di Indonesia perbankan masih merupakan sumber utama dalam permodalan dan peranan tersebut masih cukup besar dan diandalkan dibandingkan dengan sumber modal lain seperti pasar modal dan sumber-sumber permodalan lainnya. Bagi bank umum, kredit merupakan sumber penghasilan sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat sebagian diputar dalam kredit, sehingga kredit akan menjadi

sangat penting. Kredit menjadi sumber utama permodalan dari setiap jenis kegiatan usaha, jelas terlihat pada gambar dibawah ini (Data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia):



Gambar 1.1 : Perkembangan Kredit Perbankan di Indonesia

Perkembangan kredit perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jelas terlihat dari gambar di atas. Pada tahun 2001 kredit perbankan sebesar 158,023 miliar atau sebesar 3,60%. Sedangkan pada tahun 2002 kredit perbankan sebesar 198,449 miliar atau sebesar 4,52%, naik sebesar 67,222 miliar menjadi 265,671 miliar pada tahun 2003 naik menjadi 6,06%. Pada tahun 2004 kredit perbankan sebesar 335,127 miliar atau sebesar 7,64%, pada tahun 2005 meningkat menjadi 435,518 miliar naik

menjadi 9,93%. Sedangkan pada tahun 2006 kredit perbankan sebesar 555,417 miliar atau sebesar 12,66%, naik sebesar 64,62 miliar pada tahun 2007 menjadi 620,037 miliar naik menjadi 14,13% . Sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah kredit perbankan sebesar 782,403 miliar atau sebesar 17,84% dan 1.035,990 miliar atau sebesar 23,62%.

Dari gambar di atas jelas terlihat dari tahun ke tahun jumlah kredit perbankan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kredit perbankan ini besar kecilnya dipengaruhi oleh modal bank umum, dana pihak ketiga, dan tingkat suku bunga SBI (Bank Indonesia).

Untuk dapat menstabilkan dan mengatur peningkatan kredit perbankan yang digunakan untuk kegiatan produksi maupun konsumsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGARUH MODAL BANK UMUM, DANA PIHAK KETIGA, DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM DI INDONESIA (TAHUN 2001: 3 – 2009: 5)".

B. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor modal berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana faktor dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia?

3. Bagaimana tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor modal berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana suku bunga SBI berpengaruh terhadap kredit perbankan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama tentang kredit perbankan.
2. Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan masalah kredit perbankan.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang kredit perbankan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. PERBANKAN

1. Pengertian Bank

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Budi Untung, 2000: 166).

Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain (Thomas Suyatno, 1988: 1).

GM. Verryn Stuart, mengatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik bank dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Thomas Suyatno, 1988: 1).

2. Jenis bank

a. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah (Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006: 84):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (*transfer*).
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Melakukan kegiatan dari anjak (pemberian) piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 13) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 14) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna upah, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 15) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 16) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- 17) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 18) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut (Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru, 2006: 86):

- 1) Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Melakukan usaha peransuransian.
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah (Budisantoso Totok dan sigit Triandaru, 2006: 86):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut (Budisantoso Totok dan sigit Triandaru, 2006: 86):

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.

- 4) Melakukan usaha peransurasion.
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-larangan di atas, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran. Bank Umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank umum dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan usaha peransurasion, BPR dan Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

3. Fungsi dan Tujuan Bank

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat (Budi Untung, 2000: 14).

4. Kebijakan Perbankan

Kebijakan perbankan di Indonesia berisi tentang (<http://abdeejoy.blogspot.com>):

- a. Arsitektur Perbankan Indonesia
- b. Konsolidasi Perbankan
- c. Membangun Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI)
- d. Penerapan *Basel II Accord*
- e. Pengembangan Perbankan Syariah
- f. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 - 1) Harapan Industri BPR di Masa Depan
 - 2) Kelembagaan BPR
 - 3) Penyempurnaan Sistem Pengaturan dan Pengawasan BPR
 - 4) Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan BPR
 - a) Program Sertifikasi Profesional untuk BPR (CERTIF)
 - b)Penguatan Infrastruktur Industri BPR
 - 5) Peningkatan Kerjasama BPR dengan Bank Umum atau Lembaga Lain (*Linkage Program*)

- g. Penanganan Dugaan Tindakan Pidana Perbankan
- h. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - 1) Kebijakan Kredit Perbankan
 - 2) Pengembangan Kelembagaan yang Menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - 3) *Voucher System* (Program KasKu-Kupong Akses Keuangan)
 - 4) Pemberian Bantuan Teknis
 - a) Pelatihan Kepada Perbankan dan Lembaga Penyedia Jasa (BDSP)
 - b) Memfasilitasi Pertemuan antara Pemerintah, Perbankan, dan Dunia Usaha
 - c) Kerjasama Dengan Kementerian Koperasi dan UKM
 - d) Kerjasama Dengan Kementerian Lingkungan Hidup
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan

5. Ketentuan Pokok Perbankan

Ketentuan pokok dalam perbankan meliputi (<http://abdeejoy.blogspot.com>) :

- a. Pendirian Bank
 - 1) Pendirian Bank Umum
 - 2) Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (PBR)

commit to user

3) Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing

4) Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing

b. Kepemilikan bank

c. Kepengurusan Bank

1) Kepengurusan Bank Umum

2) Kepengurusan BPR Konvensional

3) Kepengurusan BPR Syariah

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) pada Bank Umum dan BPR

f. Pembelian Saham Bank Umum

g. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

h. Pembukaan Kantor Bank

i. Pemindahan Alamat Kantor Pusat dan Cabang Bank

j. Perubahan Kegiatan Usaha Bank

k. Penutupan Kantor Cabang Bank

l. Peningkatan Bank Umum Non-Devisa Menjadi Bank Umum Devisa

m. Likuidasi Bank

commit to user

6. Arsitektur perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indonesia).

Berpijak dari adanya kebutuhan perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut (Bank Indonesia).

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun

terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API. Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM (Bank Indonesia).

B. PERKREDITAN

1. Pengertian Perkreditan

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit bukan hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 12).

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup

memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan tersebut dapat berupa barang, uang, atau jasa (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 12).

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and banking* , kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 12-13).

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 13).

2. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, *commit to user*

suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 14).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 14) :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengetahuan nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan *commit to user*

modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

3. Tujuan Kredit

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 14).

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 15).

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *profitability* yang diharapkan itu menjadi kenyataan (Thomas Suyatno,dkk, 2003: 15).

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank , khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 15) :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 15):

- a. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi.
- b. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.

- c. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan *bank ability*-nya dan tanpa jaminan.
- d. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit).
Disini tersirat pertimbangan yuridis dari *revenue* (penghasilan pemerintah dengan adanya bea materai kredit).
- e. *Overdarft* (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi *plafon* kredit yang disetujui) dilarang.
- f. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).

4. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 16).

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 16):

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

1) Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

2) Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi,
- 2) Peningkatan ekspor, dan
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula

tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

5. Jenis-Jenis Kredit

Atas dasar pemberian dan penggunaan dananya oleh debitur, jenis kredit dapat dibedakan menjadi (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 19) :

a. Kredit Yang Diberikan Bank Indonesia

1) Kredit langsung

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank seperti, Pertamina, Lembaga Bukan Bank, Jawatan Pegadaian, Perum Peruri, dan usaha lain-lainnya seperti

peternakan ujung Pandang, Pupuk Kalimantan Timur, dan Ditjen Tanaman Pangan untuk pembukaan lahan baru di daerah transmigrasi.

2) Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat, dan untuk pembiayaan lainnya.

Kredit likuiditas tersebut dibagi dalam dua golongan, yakni:

- a) Kredit likuiditas gadai ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada bank-bank oleh Bank Sentral agar dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai jaminan oleh bank-bank tersebut, diberikan jaminan barang-barang para debitur dengan persetujuan yang bersangkutan.
- b) Kredit likuiditas darurat, dibedakan dalam dua jenis yakni:
 - (1) Kredit likuiditas darurat umum, adalah kredit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak diluar dari kekuasaan bank.
 - (2) Kredit likuiditas darurat khusus, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di dalam faktor-faktor intern.

3) Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian *promes* (surat sanggup) yang diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto. Berlainan dengan kredit likuiditas, fasilitas diskonto hanya dapat dimanfaatkan oleh bank-bank sebagai upaya terakhir dan merupakan bantuan dari Bank Sentral sebagai *lender of the last resort*.

b. Jenis-Jenis Kredit Perbankan Untuk Masyarakat

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 25) :

1) Kredit dilihat dari sudut tujuannya

Kredit ini terdiri atas:

- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit

perdagangan tersebut dapat terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.

2) Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas:

a) Kredit jangka pendek (*Short Term Loan*)

Kredit jangka pendek (*short Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk:

(1) Kredit rekening koran

Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan (dipakai), walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

(2) Kredit penjualan (*leveranciers Crediet*)

Kredit penjualan (*leveranciers Crediet*), yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan
commit to user

barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.

(3) Kredit pembeli (*Afnemers Crediet*)

Kredit pembeli adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.

(4) Kredit wesel

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat promes/*payable notes*).

(5) Kredit eksploitasi

Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

b) Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-

kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (*spare parts*), dan lain-lain. Kredit yang berjangka waktu menengah ini di antaranya adalah kredit modal kerja pemanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

c) Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*)

Kredit jangka panjang (*Long Term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

Dalam memberikan kredit para peminjam dari dunia usaha, sebuah bank mungkin tertarik dengan fungsi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemampuan bank memberikan pinjaman dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif, maka suku bunga di pasar uang akan turun, yang mendorong harga saham mengalami peningkatan. Sejalan peningkatan tersebut, nilai bersih perusahaan akan meningkat dan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman atau kredit akan meningkat, selanjutnya meningkatkan

commit to user

investasi, dan pada akhirnya meningkatkan output (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003: 22).

Strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional mencakup pula sejumlah langkah kebijakan dan penataan kelembagaan di bidang moneter. Dari sisi kebijakan, langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuh lebih diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Dengan masih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya tekanan inflasi, kebijakan moneter pada mulanya lebih ditekankan pada pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian melalui pencapaian sasaran operasional uang primer yang ditetapkan sesuai dengan program yang disepakati antara pemerintah dan IMF. Langkah kebijakan ini secara berangsur-angsur mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi (Perry Warjiyo, 2004).

6. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output rill*

(pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja yang tersedia (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003).

Kebijakan moneter yang disebutkan di atas merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003).

Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut (siklus) yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003).

Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan *business cycle* (siklus

kegiatan ekonomi). Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami perkembangan sangat pesat, tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi dimana perekonomian sedang mengalami *depression* atau *slump* (perkembangan yang melambat). Dalam kajian literatur dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003: 3).

Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter tersebut tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti *output* dan inflasi. Dari sejumlah literatur, temuan utama yang menarik mengenai hubungan antara uang beredar, inflasi, dan *output* adalah bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi adalah sempurna, sementara hubungan antara pertumbuhan uang atau inflasi dengan pertumbuhan *output* rill mungkin mendekati nol. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya akan berdampak pada

inflasi, dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi riil (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003: 4).

Dalam perkembangannya, perbedaan pandangan tersebut melandasi perbedaan penentuan respons kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal ini, perbedaan yang muncul berkaitan dengan apakah respons kebijakan moneter sebaliknya dilakukan dengan menggunakan *rules* (pola atau kaidah-kaidah tertentu yang dirumuskan secara permanen dalam kurun waktu tertentu) atau dengan menggunakan *discretion* (kewenangan) untuk bertindak secara aktif guna mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil yang terjadi (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003: 6).

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Dan Permintaan Kredit

Sebagaimana dalam pasar barang, keseimbangan dalam pasar kredit ditentukan oleh (Boedi Armanto, 2005) :

a. Permintaan kredit

. Sisi permintaan kredit akan ditentukan oleh harga (suku bunga) kredit serta faktor-faktor lain seperti aktivitas ekonomi, kondisi internal debitur dan faktor non-ekonomi lainnya (Boedi Armanto, 2005).

b. Penawaran kredit

Sisi penawaran kredit, juga ditentukan oleh suku bunga kredit dan faktor-faktor lain seperti karakteristik internal bank selaku pemberi kredit, yang meliputi kapasitas kredit (Dana Pihak ketiga), efisiensi operasional, kualitas aset perbankan, permodalan dan *Non Performing loans* (NPLs). Kebalikan dari sisi permintaan kredit, suku bunga dari sudut penawaran kredit berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang ditawarkan. Jika suku bunga mengalami kenaikan maka jumlah kredit yang ditawarkan juga akan meningkat, sebaliknya jika terjadi penurunan suku bunga akan diikuti menurunkan keinginan bank untuk mendistribusikan kredit. Sementara itu, rendahnya kualitas permodalan bank yang tercermin dari Dana Pihak ketiga, tingginya NPL juga akan menurunkan jumlah kredit yang ditawarkan (Boedi Armanto, 2005).

C. Hubungan Antar Variabel Independen dengan Variabel Dependen

Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut (Ketut Rindjin, 2002) :

1. Modal (*equity*)

Pengertian modal sebagaimana tersebut dalam SK Direksi BI No. 23/67/Kep./Dir. Dan SE Direksi BI No. 23/11/BPPP tanggal 28 Februari terdiri atas dua macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti meliputi: (1) modal disetor, yaitu modal yang telah disetor efektif oleh pemiliknya; (2) agio saham, yaitu selisih setoran modal yang diterima oleh

bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya; (3) cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak; (4) cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu; (5) laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya; (6) laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Adapun modal pelengkap adalah cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap dapat berupa: (1) cadangan revaluasi aktiva tetap; (2) cadangan penghapus aktiva yang diklasifikasikan, misalnya cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga; (3) pinjaman subordinasi, misalnya pinjaman yang mempunyai perjanjian tertulis antar bank dengan pemberi pinjaman (Ketut Rindjin, 2002: 103).

Modal bank berfungsi melindungi dana para penabung. Bank yang memiliki struktur modal cukup besar dapat menopang kredit jangka panjang dan beresiko tinggi. Besarnya ketentuan internasional, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) perbankan yang sehat harus memiliki nilai minimum sebesar 8%. Semakin tinggi angka CAR menunjukkan makin tingginya kemampuan bank dalam mengatasi masalah kredit macet.

Dengan kata lain, semakin tinggi modal bank akan mempertinggi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit.

2. Simpanan dana masyarakat

Adapun jenis simpanan masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: simpanan giro, deposito, dan tabungan. Simpanan giro disebut *demand deposit* atau *current accounts* adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan kebutuhan, baik dengan menggunakan cek, bilyet giro, maupun dengan jalan pemindahbukuan. Penarik simpanan giro bisa dilakukan lebih dari sekali dalam satu hari sepanjang dananya memungkinkan.

Simpanan deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan bank. Jenis deposito yang ada di Indonesia adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call* (Ketut Rindjin, 2002: 105).

Simpanan dana masyarakat akan merupakan modal bank umum yang berasal dari luar perusahaan (bank) akan menopang modal perbankan itu sendiri dengan demikian tingkat kestabilan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat akan mempengaruhi kredit yang disalurkan. Semakin tinggi simpanan dana masyarakat akan memperbesar jumlah kredit yang disalurkan.

3. Tingkat suku bunga SBI

Tingkat suku bunga SBI yang dimaksud adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk kebijakan operasi pasar terbuka dari bank sentral (Bank Indonesia). Pembelian SBI ini dilakukan melalui mekanisme sistem perbankan, yaitu penempatan atau pencairan kembali dana-dana perbankan dan dana BUMN maupun perusahaan milik negara. Hal yang diterima dari penempatan dana dalam bentuk SBI dinyatakan sebagai tingkat suku bunga SBI.

Suku bunga SBI seringkali dipersepsikan sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia, baik oleh pelaku pasar maupun masyarakat secara umum. Sedangkan suku bunga itu sendiri menurut Paul A Samuelson (1995) adalah “jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu, dengan kata lain, masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang, diukur dalam dollar pertahun untuk setiap dollar yang dipinjam adalah suku bunga”.

Operasi yang dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah dengan menggunakan SBI sebagai sarana untuk mengurangi jumlah uang beredar lewat mekanisme sistem perbankan. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga SBI akan mempengaruhi tingkat suku bunga domestik, selanjutnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga lain yang merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kredit perbankan. Semakin tinggi tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan semakin sedikit permintaan uang untuk kegiatan konsumsi dan produksi.

D. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian Tatik Setiyawati (2007) dilakukan pengujian pengaruh variabel Produk Domestik Bruto (PDB), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan suku bunga terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Dengan menggunakan alat analisis *Error Correction Model* (ECM) disimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga dan suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran kredit, dimana jika dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga mengalami kenaikan maka penyaluran kredit perbankan mengalami penurunan. Sedangkan variabel produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia.

Hasil penelitian Meisy Anggun Elizabeth Anggia (2009) dilakukan pengujian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kredit UMKM di Indonesia (tahun 1992-2007). Dengan menggunakan alat analisis *Error Correction Model* (ECM) disimpulkan bahwa variabel DPK, PDB dan tingkat suku bunga diduga berpengaruh positif terhadap penawaran kredit UMKM. Sedangkan variabel *dummy* sebelum dan sesudah krisis diduga berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit UMKM.

Ardhiani Ringga Rositasari (2005) mengadakan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit investasi pada bank umum di Indonesia tahun 1983-2003. Kegiatan investasi dilakukan oleh sektor swasta melalui pengusaha dan dalam hal ini perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan investasinya. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk kegiatan investasi perusahaan adalah bank umum dengan menyediakan kredit

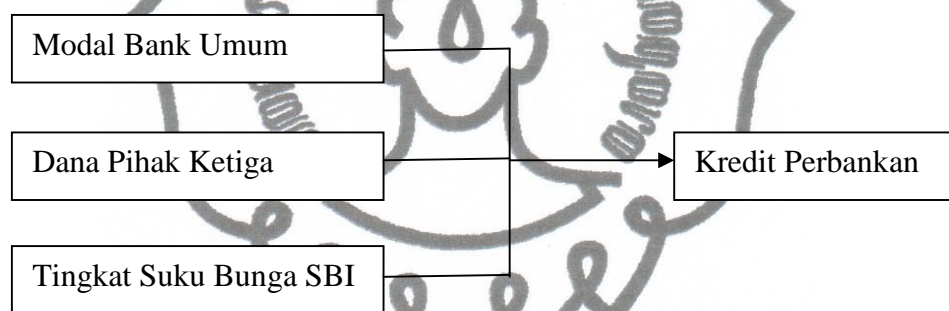
dalam bentuk investasi. Dalam penelitian tersebut faktor dana masyarakat, jumlah bank umum, dan suku bunga kredit investasi berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit investasi di bank umum baik secara individu maupun secara bersama-sama.

Hasil penelitian I Gede Putra Arsana, S.E. 2005 melakukan pengujian pengaruh nilai tukar rupiah terhadap aliran kredit dan mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur kredit. Penelitian ini untuk melihat; pertama, pengaruh depresiasi nilai tukar terhadap penurunan aliran kredit; kedua, pengaruh kebijakan moneter ketat terhadap penurunan permintaan kredit dan atau peningkatan penawaran kredit; ketiga, pengaruh depresiasi nilai tukar pada efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan dan jalur kredit luas dengan dekomposisi varians dan IRF metode VAR.

E. Kerangka Pemikiran

Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan sebelum krisis tidak terlepas dari besarnya kemampuan bank dalam memberikan kredit. Ini menunjukkan adanya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan produksi maupun konsumsi, sehingga kredit perbankan terus mengalami kenaikan. Kredit perbankan dapat disalurkan karena adanya dana dari modal bank umum dan dana pihak ketiga. Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat ini. Keberadaan dana masyarakat yang sering dikenal dengan istilah dana pihak ketiga itu digunakan untuk menjalankan fungsi bank sehari-hari. Selain itu, dana tersebut juga disalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan produktifitas usaha yang nantinya meningkatkan pembangunan. Semakin banyak kredit yang disalurkan berarti terdapat peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Sejalan dengan semakin memburuknya situasi moneter Indonesia dan semakin melemahnya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter merasa perlu untuk menaikkan tingkat suku bunga secara signifikan. Kebijakan BI ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perbankan di Indonesia. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Skema kerangka pemikiran

Modal bank berfungsi melindungi dana para penabung. Bank yang memiliki struktur modal cukup besar dapat menopang kredit jangka panjang dan beresiko tinggi. Besarnya ketentuan internasional, *CAR (Capital Adequacy Ratio)* perbankan yang sehat harus memiliki nilai minimum sebesar 8%. Semakin tinggi angka *CAR* menunjukkan makin tingginya kemampuan bank dalam mengatasi masalah kredit macet. Dengan kata lain, semakin tinggi modal bank akan mempertinggi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit.

Simpanan dana masyarakat merupakan modal bank umum yang berasal dari luar perusahaan (bank) ini akan menopang modal perbankan itu sendiri dengan demikian tingkat kestabilan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat akan mempengaruhi kredit yang disalurkan. Semakin tinggi simpanan dana masyarakat akan memperbesar jumlah kredit yang disalurkan.

Operasi yang dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah dengan menggunakan SBI sebagai sarana untuk mengurangi jumlah uang beredar lewat mekanisme sistem perbankan. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga SBI akan mempengaruhi tingkat suku bunga domestik, selanjutnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga lain yang merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kredit perbankan. Semakin tinggi tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan semakin sedikit permintaan uang untuk kegiatan konsumsi dan produksi.

F. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga modal bank umum berpengaruh positif terhadap kredit perbankan pada bank umum di Indonesia.
2. Diduga dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kredit perbankan pada bank umum di Indonesia.
3. Diduga tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap kredit perbankan pada bank umum.

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai kredit perbankan pada bank umum. Dalam menganalisis penyaluran kredit perbankan digunakan data yang dianggap mampu menerangkan, yaitu: modal bank umum, dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga SBI.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data dari Bank Indonesia. Data-data diperoleh dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia yang kesemuanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Kredit perbankan adalah jumlah dana bank yang disalurkan oleh seluruh bank umum kepada masyarakat untuk kegiatan konsumsi maupun produksi yang diberikan kepada debitur perbankan di Indonesia, diukur dengan satuan miliar rupiah.
2. Modal bank umum adalah dana seluruh bank umum yang ada di Indonesia bersumber dari pemilik bank dan pemegang saham, yang terdiri dari modal inti (modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan) dan modal pelengkap (cadangan *commit to user*

revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, dan pinjaman subordinasi), diukur dengan satuan miliar rupiah.

3. Dana simpanan masyarakat adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun bank umum di Indonesia, yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka, diukur dengan satuan miliar rupiah.
4. Tingkat suku bunga SBI adalah tingkat suku bunga surat berharga dari Bank Indonesia yang dikeluarkan untuk tujuan pengendalian moneter, diukur dengan satuan persen.

D. Metode Analisis Data

1. Pemilihan Bentuk Model Fungsi

Pemilihan model dalam analisis suatu penelitian sangat penting dilakukan. Terdapat beberapa uji untuk menentukan model fungsi mana yang paling baik untuk mengestimasi fungsi Kredit Perbankan. Uji-uji tersebut antara lain: metode model informasi Box- Cox, uji J, uji JM, metode yang dikembangkan oleh Mac Kinnon, White davidson (MWD test), metode Bara dan Mc Aleer (B-M test), dan metode Zarembaka. Uji yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji Mc Kinnon, White davidson (MWD test) (Damodar Gudjarati, 1993: 23).

Uji MWD di sini dilakukan untuk menguji model fungsi Kredit Perbankan apakah lebih baik menggunakan model linear ataukah non linear. Model fungsi linearnya adalah sebagai berikut:

$$KP = \beta_0 + \beta_1 M + \beta_2 DPK + \beta_3 SBI + e_i \dots\dots\dots(3.1)$$

commit to user

Adapun model fungsi permintaan dalam bentuk non linear adalah sebagai berikut:

$$\text{LnKP} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnM} + \beta_2 \text{LnDPK} + \beta_3 \text{LnSBI} + e_i \dots\dots\dots(3.2)$$

Langkah-langkah untuk melakukan uji MWD, sebagai berikut:

- a. Melakukan regresi terhadap persamaan (3.1), kemudian didapat nilai fitted dari KP, yang dimana = KPf.
- b. Melakukan regresi terhadap persamaan (3.2), kemudian didapat nilai fitted dari LnKP/LnKP.
- c. Dapatkan nilai Z_1 dengan cara mengurangkan Ln dari LnPWDFN dengan nilai fitted LnF/LnKP.
($Z_1 = \text{LnKPf} - \text{LnF/Ln(KP)} - \text{LKPF}$)
- d. Melakukan regresi dengan menggunakan persamaan (3.1) ditambahkan Z_1 sebagai variabel penjelas atau:
$$\text{KP} = \beta_0 + \beta_1 \text{M} + \beta_2 \text{DPK} + \beta_3 \text{SBI} + Z_1 + e_i \dots\dots\dots(3.3)$$
- e. Fungsi permintaan KP lebih baik pakai model linear bila Z_1 dalam regresi (3.3) tidak signifikan, dan bila Z_1 dalam regresi (3.3) signifikan lebih baik memakai model non linear.

Setelah pengujian MWD di atas dilakukan terbukti bahwa fungsi kredit perbankan lebih bagus dan tepat menggunakan model non linear (lihat lampiran halaman 87).

2. Pengujian Model Fungsi Permintaan Kredit Perbankan

Untuk menyelesaikan analisis ini digunakan program *Eviews Model* dan fungsi tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{LN KP} = \beta_0 + \beta_1 \text{LN M} + \beta_2 \text{LN DPK} + \beta_3 \text{SBI} + e_i$$

Dimana :

KP = kredit perbankan

M = modal bank umum

DPK = dana pihak ketiga

SBI = tingkat suku bunga SBI

e_i = variabel pengganggu

Dari hasil estimasi dengan menggunakan model tersebut diatas kemudian dilakukan uji statistika dan uji asumsi klasik. Uji statistika meliputi uji t, uji f dan uji R^2 . Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Statistik

1. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain tetap atau konstan. Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut:

i. Menentukan hipotesis

$H_0: \beta_1 = 0$ berarti tidak ada pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_2 = 0$ berarti tidak ada pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

commit to user

$H_a: \beta_1 \neq 0$ berarti ada pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta_2 \neq 0$ berarti ada pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

ii. Melakukan penghitungan nilai t

Nilai $t_{tabel} = t_{\alpha/2; df=N-K}$

Keterangan:

α =derajat signifikansi

N =jumlah sampel(observasi)

K =banyaknya parameter/koeffisien regresi dan konstanta

Nilai $t_{hitung} = \frac{\beta_1}{se(\beta)}$

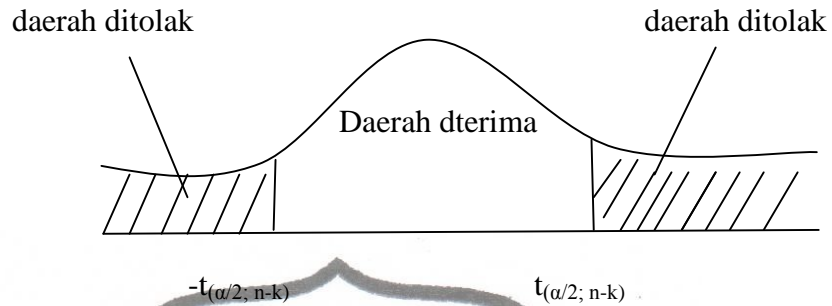
Keterangan:

β_i = koefisien regresi

$Se(\beta_i)$ = *standard error* koefisien regresi

iii. Kriteria pengujian

Apabila nilai t hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t tabel yang digunakan ($t_{hitung} < t_{tabel}$) pada tingkat signifikansi 5% dan nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel yang digunakan pada tingkat signifikansi 5%, maka H_0 diterima yang berarti variabel independen tersebut tidak berbeda dengan nol (tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen).



Gambar 3.1 : Daerah Kritis Uji t

2) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua koefisien regresi. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

Hipotesis:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

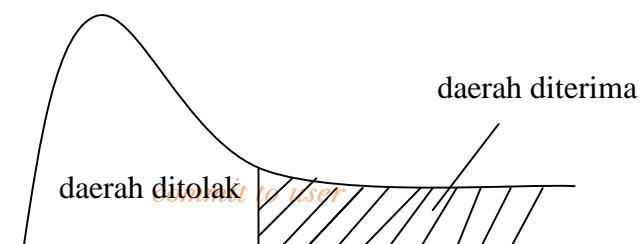
$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$$

$$\text{Nilai } F_{\text{tabel}} = F(\alpha; N-k; k-1)$$

Dimana: N = jumlah sampel

K = banyaknya parameter

$$\alpha = 5\%$$



$$F_{(\alpha; N-k; k-1)}$$

Gambar 3.2 : Daerah Kritis Uji F

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)}$$

Dimana: R^2 = koefisien determinasi

N = jumlah sampel

k = jumlah variabel

Kriteria pengujian:

- Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak signifikan.
- Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan.

3) Koefisien determinasi (R^2)

R^2 merupakan koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Analisis ini mempunyai ketentuan jika R^2 mendekati nol, maka variabel bebas yang dipilih tidak dapat menerangkan variabel terikatnya. Jika R^2 mendekati 1, maka variabel bebas yang dipilih dapat menerangkan dengan baik variabel terikatnya. Rumus R^2 adalah sebagai berikut:

$$R^2 = ESS/TSS = 1 - RSS/TSS$$

commit to user

Dimana : ESS = Explained Sum Of Square

RSS = Residual Sum Of Square

TSS = Total Sum Of Square

b. Uji asumsi klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah kondisi dimana dalam suatu model regresi terdapat korelasi linier antara beberapa atau seluruh variabel penjelas. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam ekonomi karena dalam ekonomi, sesuatu tergantung pada sesuatu yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, dilakukan pengujian dengan metode *Klein*, yaitu membandingkan nilai $r^2_{xi, xj}$ (korelasi antar masing-masing variabel independen) dengan nilai $R^2_{y xi, xj, \dots, xn}$ (koefisien determinasi). Apabila nilai $R^2 > r^2$ berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas. Apabila $R^2 < r^2$ berarti terjadi multikolinieritas (Damodar Gujarati 1995: 157-167).

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Park dan uji Glejser.

Uji Park memformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa

U_i^2 adalah suatu fungsi dari X_i . Fungsinya adalah:

$$U_i^2 = \alpha X_i^\beta e^{v_i} \text{ atau}$$

$$\ln U_i^2 = \ln \alpha + \beta \ln X_i + v_i \text{ menjadi}$$

commit to user

$$\ln U_i^2 = \beta_0 + \beta_1 \ln X_i + v_i$$

Dimana v_i adalah unsur gangguan yang stokhastik.

Diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model Park menjadi:

$$\ln U_i^2 = \alpha + \beta_1 \ln M + \beta_2 \ln DPK + \beta_3 \text{SBI} + v_i$$

Koefisien β yang diperoleh diuji dengan uji t dimana hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

H_a : terdapat masalah heteroskedastisitas

Jika koefisien regresi β ternyata signifikan secara statistik maka terdapat heteroskedastisitas. Apabila tidak signifikan maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Glejser adalah uji yang mempunyai semangat yang sama dengan pengujian Park. Setelah mendapatkan residual U_i dari regresi OLS, Glejser menyarankan untuk meregresi nilai absolut dari U_i , $|U_i^2|$ terhadap variabel X yang diperkirakan mempunyai hubungan erat dengan U_i^2 . Dalam pengujian Glejser menggunakan bentuk fungsional sebagai berikut:

$$|U_i^2| = \alpha + \beta_1 \ln M + \beta_2 \ln DPK + \beta_3 \text{SBI} + v_i$$

Koefisien β_1 yang diperoleh diuji dengan uji t dimana hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

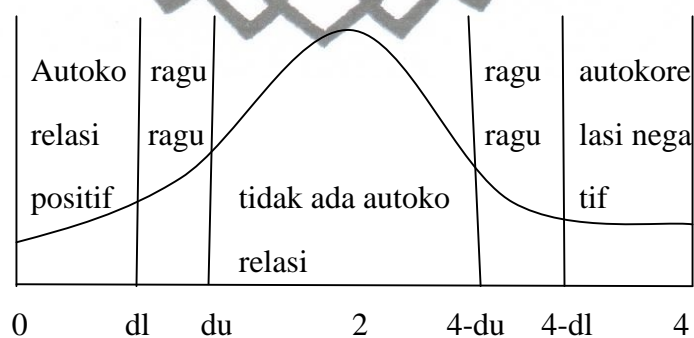
H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

H_a : terdapat masalah heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan cara meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel independen. Kemudian hasil regresi tahap dua tersebut dilakukan kembali uji t dengan melihat probabilitasnya. Dari probabilitas tersebut akan diketahui signifikansi setiap variabel independennya terhadap variabel dependen. Dari hasil tersebut akan diketahui jika semua koefisien regresi tersebut tidak signifikan berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil. Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin – Watson).



Gambar 3.3: Daerah H_0 diterima dan ditolak dalam Uji Autokorelasi

Hipotesis untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah:

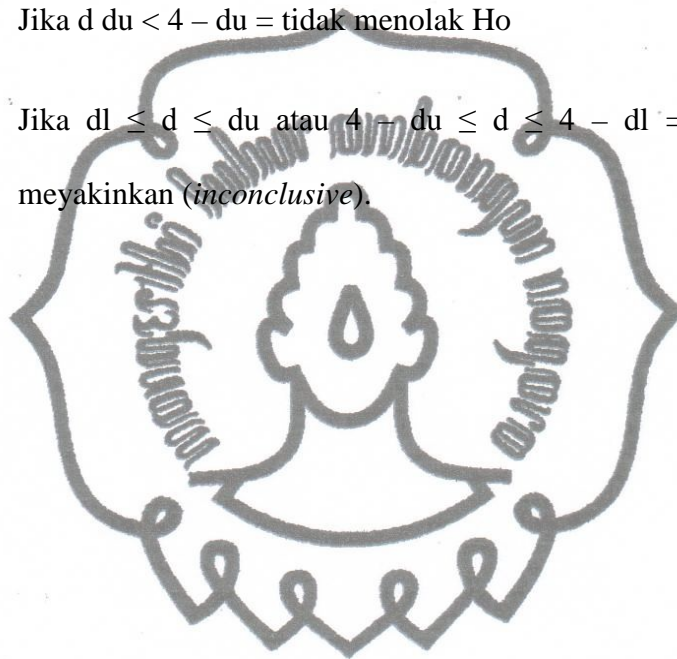
H_0 : tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif.

Untuk menguji hipotesis nol tidak ada autokorelasi, terdapat tabel Durbin-Watson (DW), dengan kriteria hasil perhitungan DW statistik dibandingkan dengan tabel (DW), sebagai berikut:

Jika $d < d_l$ = menolak H_0

Jika $d_{du} < 4 - d_u$ = tidak menolak H_0

Jika $d_l \leq d \leq d_u$ atau $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ = pengujian tidak meyakinkan (*inconclusive*).



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkembangan perbankan di Indonesia

Kondisi dunia perbankan dunia telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan diluar dunia perbankan, seperti sektor rill dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam empat periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor rill dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000. Keempat periode itu adalah (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006):

1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor rill dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an;
2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an;

3. Kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an;
4. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

a. Kondisi sebelum deregulasi

Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pada masa kolonial kegiatan perbankan di wilayah Hindia-Belanda ini terutama diarahkan untuk melayani kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan besar milik kolonial di wilayah jajahannya serta membentuk administrasi anggaran milik pemerintah. Dengan demikian fungsi utama perbankan pada masa penjajahan adalah (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006):

- 1) Mobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik kolonial.
- 2) Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar milik kolonial, seperti giro, garansi bank, pemindahan dana dan lain-lain.
- 3) Membantu pemindahan dana jasa modal dari wilayah kolonial ke negara-negara penjajah.
- 4) Sebagai tempat sementara dari dana hasil pemungutan pajak, baik pajak dari perusahaan-perusahaan maupun dari masyarakat pribumi, untuk kemudian dikirim ke negara-negara penjajah.

- 5) Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah kolonial.

Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Orientasi kegiatan perbankan masih banyak dipengaruhi oleh pola yang diterapkan pada masa penjajahan. Dengan demikian fungsi utamanya adalah (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006):

- 1) Memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar.
- 2) Memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar.
- 3) Mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah.
- 4) Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah.

Bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasikan dana seluas-luasnya dari seluruh anggota masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan diatas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan

perundang-undangan yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Secara lebih rinci keadaan perbankan saat ini adalah sebagai berikut (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006):

- 1) Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia.
- 2) Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu.
- 3) Bank banyak menanggung program-program pemerintah.
- 4) Instrumen pasar uang yang terbatas.
- 5) Jumlah bank swasta yang relatif sedikit.
- 6) Sulitnya pendirian bank baru.
- 7) Persaingan antar bank yang tidak ketat.
- 8) Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah.
- 9) Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit.
- 10) Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam uang.
- 11) Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah.

b. Kondisi Sesudah Deregulasi

Tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak baik terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut seolah-olah menjadi

suatu lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya serta saling mempengaruhi.

Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor riil dan di sektor moneter. Pada tahap awal deregulasi lebih cepat dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di dunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan deregulasi, tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Perubahan yang terjadi juga termasuk peningkatan pengaturan pada bidang-bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006).

Kebijakan deregulasi yang telah dilakukan dan terkait dengan dunia perbankan antara lain adalah (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006):

- 1) Paket 1 Juni 1983.
- 2) Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI.
- 3) Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh Bank Indonesia.

- 4) Paket 27 Oktober 1988.
- 5) Paket 20 Desember 1988.
- 6) Paket 25 Maret 1989.
- 7) Paket 29 Januari 1990.
- 8) Paket 28 Februari 1991.
- 9) UU Nomor 7 Tahun 1992.
- 10) Paket 29 Mei 1993.

Serangkaian kebijakan di atas telah mengakibatkan banyak perubahan dalam perbankan di Indonesia. Ciri-ciri kondisi perbankan pada masa sebelum deregulasi sudah tidak dapat ditemui lagi pada masa setelah deregulasi, sehingga pada masa setelah deregulasi ini perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit, 2006):

- 1) Peraturan yang memberikan kepastian hukum.
- 2) Jumlah bank swasta bertambah banyak.
- 3) Tingkat persaingan bank yang semakin kuat.
- 4) Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang.
- 5) Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat.
- 6) Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Diskriptif

a. Perkembangan Kredit Perbankan

Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan sebelum krisis tidak terlepas dari besarnya kemampuan bank dalam memberikan kredit (*lending capacity*). Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang relatif sejalan antara *lending capacity* dengan pertumbuhan kredit perbankan.

Pada kondisi krisis, perbankan tetap berusaha menyalurkan dana berupa pinjaman atau kredit selain tetap dengan tujuan berusaha menjaga operasionalnya, juga turut mendukung pergerakan perekonomian nasional. Fungsi intermediasi perbankan selama masa krisis dapat dilihat dari perkembangan posisi kredit kepada sektor ekonomi.

Tabel 4.1 : Perkembangan Kredit Perbankan Tahun 2001 - 2009 .

Tahun	Kredit Perbankan (dalam miliar rupiah)	Pertumbuhan (dalam persen)
2001	158,023	0,122
2002	198,449	0,891
2003	265,671	1,481
2004	335,127	1,53
2005	435,518	2,211
2006	555,417	2.642
2007	620,037	1,423
2008	782,403	3,577
2009	1.035,990	5,588

Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan kredit perbankan dari tahun 2001 – 2008 terlihat bahwa kredit perbankan terus mengalami kenaikan. Jelas terlihat bahwa pada tahun 2001 jumlah kredit perbankan sebesar 158,023 miliar rupiah tumbuh sebesar 0,122 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2002 menjadi 198,449 miliar rupiah tumbuh sebesar 0,891 persen, pada tahun 2003 kredit perbankan naik sebesar 67,222 miliar rupiah menjadi 265,671 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 1,481 persen. Sedangkan pada tahun 2004 kredit perbankan menjadi 335,127 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 1,53 persen, naik sebesar 100,391 miliar rupiah menjadi 435,518 miliar rupiah pada tahun 2005 atau tumbuh sebesar 2,211 persen. Pada tahun 2006 kredit perbankan naik lagi menjadi 555,417 miliar rupiah tumbuh sebesar 2,642 persen, naik sebesar 64,62 miliar rupiah menjadi 620,037 miliar rupiah pada tahun 2007 atau tumbuh sebesar 1,423 persen. Sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah kredit perbankan masing-masing sebesar 782,403 miliar rupiah dan 1.035,990 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 3,577 persen dan 5,588 persen. Ini menunjukkan adanya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan produksi maupun konsumsi, sehingga kredit perbankan terus mengalami kenaikan. Kredit perbankan dapat disalurkan karena adanya dana dari modal bank umum dan dana pihak ketiga.

b. Perkembangan Modal Bank Umum

Paket kebijakan Mei 1993 atau disebut dengan Pak Mei '93 memberikan kewajiban pada perbankan untuk memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum (KPMM). Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat ini. Sebagai catatan, di Indonesia simpanan yang berbentuk tabungan yang biasanya berasal dari masyarakat lapisan menengah ke bawah nampaknya tidak begitu banyak bila dibanding dengan deposito dan giro. Sebaliknya, pertumbuhan giro dan deposito ini sangat bergantung dengan kondisi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.2 : Perkembangan Modal Bank Umum Tahun 2001 – 2009.

Tahun	Modal Bank Umum (dalam miliar rupiah)	Pertumbuhan (dalam persen)
2001	65,052	1,134
2002	75,552	1,826
2003	74,910	-0,05
2004	118,759	3,5
2005	135,851	1,345
2006	146,812	1,862
2007	176,148	2,308
2008	207,141	2,438
2009	220,333	1,038

Sumber : Bank Indonesia

Perkembangan modal bank umum juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2001-2009. Pada tahun 2001 jumlah modal

bank umum sebesar 65,052 miliar rupiah naik sebesar 10,5 miliar rupiah, atau tumbuh sebesar 1,134 persen, pada tahun 2002 menjadi 75,552 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 1,826 persen. Sedangkan pada tahun 2003 modal bank umum turun sebesar 0,642 miliar rupiah menjadi 74,910 miliar rupiah atau turun sebesar 0,05 persen, naik lagi pada tahun 2004 menjadi 118,759 miliar rupiah, tumbuh sebesar 3,5 persen. Kemudian pada tahun 2005 modal bank umum 135,851 miliar rupiah, naik sebesar 10,961 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 1,345 persen, pada tahun 2006 menjadi 146,812 miliar rupiah, tumbuh sebesar 1,862 persen. Pada tahun 2007 modal bank umum sebesar 176,148 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 2,308 persen. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah modal bank umum sebesar 207,141 miliar rupiah, naik sebesar 13,192 miliar rupiah menjadi 220,333 miliar rupiah pada tahun 2009, tumbuh sebesar 2,438 persen dan 1,038 persen. Modal bank umum ini penting untuk kelancaran usaha perbankan dan dalam penyaluran kredit.

c. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dimana keberadaannya dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tersebut membutuhkan modal pembangunan yang berasal dari masyarakat. Dana dari masyarakat tersebut merupakan sumber dana perbankan selain sumber dana yang berasal dari modal sendiri.

Keberadaan dana masyarakat yang sering dikenal dengan istilah dana pihak ketiga itu digunakan untuk menjalankan fungsi bank sehari-hari. Selain itu, dana tersebut juga disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan produktifitas usaha yang nantinya meningkatkan pembangunan. Semakin banyak kredit yang disalurkan berarti terdapat peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Mobilisasi dana perbankan terus mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan mulai memulih setelah mengalami penurunan krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997. Peningkatan dana pihak ketiga dikarenakan menariknya suku bunga yang ditawarkan pihak bank untuk menarik nasabah menyimpan dana menganggurnya di bank. Perkembangan yang menunjukkan peningkatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk rupiah lebih besar dari valas mengindikasikan bahwa masyarakat masih berminat untuk menyimpan dana dalam bentuk rupiah meskipun terjadi kecenderungan melemahnya kurs rupiah (Bank Indonesia, 2000: 72).

Meningkatnya giro dan tabungan serta menurunnya deposito menunjukkan terjadinya pergeseran komposisi dana pihak ketiga ke bentuk simpanan yang lebih likuid. Pergeseran komposisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan terjadinya trend penurunan suku

commit to user

bunga, dan juga adanya alternatif penanaman dana lain yang lebih tinggi seperti reksadana.

Tabel 4.3 : Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2001 – 2009.

Tahun	Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	Pertumbuhan (dalam persen)
2001	575,204	0,203
2002	638,597	0,623
2003	677,130	0,378
2004	741,029	0,628
2005	805,873	0,637
2006	926,065	1,181
2007	1.090,862	1,619
2008	1.249,522	1,559
2009	1.459,453	2,063

Sumber : Bank Indonesia

Perkembangan dana pihak ketiga dari tahun 2001 – 2009 terlihat bahwa dana pihak ketiga terus mengalami kenaikan. Jelas terlihat bahwa pada tahun 2001 dana pihak ketiga sebesar 575,204 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 0,203 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2002 menjadi 638,597 miliar rupiah, tumbuh sebesar 0,623 persen, pada tahun 2003 dana pihak ketiga naik sebesar 38,533 miliar rupiah menjadi 677,133 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 0,378 persen. Sedangkan pada tahun 2004 dana pihak ketiga sebesar 741,029 miliar rupiah, tumbuh sebesar 0,628 persen, naik sebesar 64,844 miliar rupiah menjadi 805,873 miliar rupiah pada tahun 2005 atau tumbuh sebesar 0,637 persen. Pada tahun 2006 dana pihak

ketiga semakin naik menjadi 926,065 miliar rupiah, tumbuh sebesar 1,181 persen, naik sebesar 164,797 miliar rupiah menjadi 1.090,862 pada tahun 2007 atau sebesar 1,169 persen. Sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah dana pihak ketiga sebesar 1.249,522 miliar rupiah dan 1.459,453 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 1,559 persen dan 2,063 persen. Sumber dana pihak ketiga berasal dari tabungan, giro, dan deposito berjangka yang merupakan dana terbesar dalam penyaluran kredit perbankan.

d. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI

Mulai tahun 1995 perkembangan suku bunga SBI merupakan dampak dari kebijakan moneter untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam masyarakat untuk menekan inflasi. Sejalan dengan semakin memburuknya situasi moneter Indonesia dan semakin melemahnya nilai tukar rupiah, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter merasa perlu untuk menaikkan tingkat suku bunga secara signifikan. Kebijakan Bank Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perbankan di Indonesia. Kondisi ekonomi yang tidak menentu menyebabkan bank-bank ada yang menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi sehingga calon debitur berpikir dua kali untuk mengajukan pinjaman.

Tabel 4.4 : Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2001 – 2009 (dalam persen).

Tahun	Suku Bunga SBI	Suku Bunga Bank Umum
2001	15,58	2,00
2002	16,93	2,00
2003	12,69	2,00
2004	7,86	2,00
2005	7,42	2,00
2006	12,75	2,00
2007	9,50	2,00
2008	8,00	2,00
2009	9,50	2,00

Sumber : Bank Indonesia

Perkembangan suku bunga SBI juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 – 2009. Pada tahun 2001 jumlah suku bunga SBI sebesar 15,58 persen naik 1,35 persen pada tahun 2002 menjadi 16,93 persen. Sedangkan pada tahun 2003 suku bunga SBI sebesar 12,69 persen, turun pada tahun 2004 menjadi 7,86 persen. Kemudian pada tahun 2005 suku bunga SBI turun 0,44 persen menjadi 7,42 persen. Pada tahun 2006 suku bunga SBI menjadi 12,75 persen. Pada tahun 2007 suku bunga SBI turun sebesar 3,25 persen menjadi 9,50. Sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah suku bunga SBI sebesar 8,00 persen dan 9,50 persen. Sedangkan suku bunga bank umum dari tahun ke tahun sebesar 2,00 persen, suku bunga bank ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kenaikan dan penurunan ini disebabkan karena perbankan ingin mempertahankan suku bunga kredit.

2. Analisis Induktif

a. Persamaan Regresi

Pengestimasian seluruh model persamaan regresi ini menggunakan program *Econometric View*. Hasil regresinya adalah sebagai berikut:

TABEL 4.6
OLAH DATA REGRESI LINIER

Dependent Variable: LOG(KP)
Method: Least Squares
Date: 09/17/10 Time: 10:14
Sample: 2001:03 2009:05
Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.377427	0.327237	-13.37694	0.0000
LOG(M)	0.447860	0.085201	5.256521	0.0000
LOG(DPK)	1.242463	0.101774	12.20803	0.0000
SBI	-0.011639	0.004177	-2.786288	0.0064
R-squared	0.979234	Mean dependent var	6.094824	
Adjusted R-squared	0.978578	S.D. dependent var	0.553215	
S.E. of regression	0.080969	Akaike info criterion	-2.149927	
Sum squared resid	0.622824	Schwarz criterion	-2.045073	
Log likelihood	110.4214	F-statistic	1493.269	
Durbin-Watson stat	0.274998	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber : Hasil analisis dengan E-views

Dari hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.6 di atas maka dapat diperoleh fungsi regresi OLS sebagai berikut :

$$\text{LN KP} = -4,377427 + 0,447860 \text{ LN M} + 1,242463 \text{ LN DPK} - 0,011639\text{SBI}$$

commit to user

Dimana :

KP = Kredit Perbankan

β_0 = Intersep

M = Modal Bank Umum

DPK = Dana Pihak Ketiga

SBI = Tingkat Suku Bunga SBI

b. Pengujian Persamaan Regresi

1) Uji Teori

Variabel Modal Bank Umum mempunyai koefisien 0,447860 ; koefisien positif menunjukkan bahwa jika Modal Bank Umum naik, Kredit Perbankan akan naik, berarti pengaruh Modal Bank Umum terhadap Kredit Perbankan sesuai dengan teori.

Variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai koefisien 1,242463 ; koefisien positif menunjukkan bahwa jika Dana Pihak Ketiga naik, Kredit Perbankan akan naik, berarti pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kredit Perbankan sesuai dengan teori.

Variabel Tingkat Suku Bunga SBI mempunyai koefisien -0,011639 ; koefisien negatif menunjukkan bahwa jika Tingkat Suku Bunga SBI naik, Kredit Perbankan akan turun, berarti pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Kredit Perbankan sesuai dengan teori.

2) Uji Statistik

a) Uji t

(1) Variabel Modal Bank Umum

Koefisien Modal Bank Umum sebesar 0,447860 merupakan parameter variabel yang signifikan dengan tingkat signifikansi 5%, dengan probabilitas kesalahan 0%, sehingga kesimpulannya variabel Modal Bank Umum terbukti berpengaruh terhadap variabel Kredit Perbankan.

(2) Variabel Dana Pihak Ketiga

Koefisien Dana Pihak Ketiga sebesar 1,242463 merupakan parameter variabel yang signifikan dengan tingkat signifikansi 5%, dengan probabilitas kesalahan 0%, sehingga kesimpulannya variabel Dana Pihak Ketiga terbukti berpengaruh terhadap variabel Kredit Perbankan.

(3) Variabel Tingkat Suku Bunga SBI

Koefisien Tingkat Suku Bunga SBI sebesar -0,011639 merupakan parameter variabel yang signifikan dengan tingkat signifikansi 5%, dengan probabilitas kesalahan 0,64%, sehingga kesimpulannya variabel Tingkat Suku Bunga SBI terbukti berpengaruh terhadap variabel Kredit Perbankan.

b) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua koefisien regresi. Secara bersama-sama variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen* menunjukkan tingkat probabilitas dibawah 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara bersama-sama signifikan.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan estimasi menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,978578 yang berarti 97,85% variasi perubahan dalam variabel Kredit Perbankan dapat dijelaskan oleh variasi variabel Modal Bank Umum, Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Suku Bunga SBI, sedangkan sisanya sebesar 2,15% dijelaskan faktor lain diluar model.

d) Uji Asumsi Klasik

(1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah kondisi dimana dalam suatu model regresi terdapat korelasi linier antara beberapa atau seluruh variabel penjelas. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam ekonomi karena dalam ekonomi, sesuatu tergantung pada sesuatu yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, dilakukan pengujian dengan metode *Klein*, yaitu membandingkan nilai r^2 x_i, x_j (korelasi antar

masing-masing variabel independen) dengan nilai $R^2 y_{xi}$, x_j, \dots, x_n (koefisien determinasi). Apabila nilai $R^2 > r^2$ berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas. Apabila $R^2 < r^2$ berarti terjadi multikolinieritas (Damodar Gujarati 1995: 157-167). Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel <i>Dependen</i>	Variabel <i>Independen</i>	R^2	r^2	Keterangan
M	DPK, SBI	0,978578	0,976136	Tidak Terdapat multikolinieritas
DPK	M, SBI	0,978578	0,969814	Tidak Terdapat multikolinieritas
SBI	M, DPK	0,978578	0,670994	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber : Data diolah

Keterangan :

KP = Kredit Perbankan (miliar rupiah)

M = Modal Bank Umum (miliar rupiah)

DPK = Dana Pihak Ketiga (miliar rupiah)

SBI = Tingkat Suku Bunga SBI (persen)

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua variabel modal, dana pihak ketiga, dan suku bunga SBI tidak terdapat masalah multikolinieritas. Nilai r^2 semua variabel tersebut lebih kecil sedangkan nilai R^2 semua variabel lebih besar berarti antara variabel Modal Bank

Umum, variabel Dana Pihak Ketiga, dan variabel Suku Bunga SBI terdapat hubungan yang linear atau mendekati linear. Akibat adanya multikolinearitas sempurna $r^2 = 1$ adalah koefisien menjadi sangat besar. Namun selama multikolinearitas tidak sempurna, yakni nilai $r^2 < 1$ dari variabel yang tetap mungkin tetapi taksiran dan kesalahan standarnya menjadi sangat sensitif terhadap sedikit perubahan dalam data.

(2) Uji Heteroskedastisitas

Untuk uji Heteroskedastisitas penulis menggunakan Uji Park dan Uji Glejser. Dari hasil regresi Uji Park diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 4.8
OLAH DATA UJI PARK

Dependent Variable: LOG(Ui²)
Method: Least Squares
Date: 12/03/10 Time: 14:03
Sample: 2001:03 2009:05
Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-18.73130	7.327137	-2.556428	0.0122
LOG(M)	0.678378	1.907725	0.355595	0.7229
LOG(DPK)	1.085373	2.278819	0.476288	0.6350
SBI	0.190317	0.093533	2.034747	0.0447
R-squared	0.074191	Mean dependent var	-6.031866	
Adjusted R-squared	0.044955	S.D. dependent var	1.855158	
S.E. of regression	1.812979	Akaike info criterion	4.067385	
Sum squared resid	312.2549	Schwarz criterion	4.172238	
Log likelihood	-197.3356	F-statistic	2.537651	
Durbin-Watson stat	0.845006	Prob(F-statistic)	0.061228	

Sumber : Hasil analisis dengan E-views

Dari hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.8 di atas maka dapat diperoleh fungsi regresi OLS sebagai berikut :

$$\ln U_i^2 = 0,678378 \ln M + 1,085373 \ln DPK + 0,190317 \text{ SBI}$$

Koefisien Modal Bank Umum dan Dana Pihak Ketiga menunjukkan bahwa parameter variabel ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga kesimpulannya variabel Modal Bank Umum dan Dana Pihak Ketiga tidak terdapat masalah heterokendastisitas. Koefisien suku bunga SBI menunjukkan bahwa parameter variabel ini signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga terjadi heterokendastisitas.

Hasil regresi Uji Glejser diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL 4.9
OLAH DATA UJI GLEJSER

Dependent Variable: $|U_i^2|$
 Method: Least Squares
 Date: 12/03/10 Time: 14:06
 Sample: 2001:03 2009:05
 Included observations: 99

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.184593	0.172638	-1.069252	0.2877
LOG(M)	0.021476	0.044949	0.477789	0.6339
LOG(DPK)	0.013520	0.053692	0.251803	0.8017
SBI	0.005103	0.002204	2.315524	0.0227
R-squared	0.078572	Mean dependent var	0.066264	
Adjusted R-squared	0.049474	S.D. dependent var	0.043814	
S.E. of regression	0.042716	Akaike info criterion	-3.428902	
Sum squared resid	0.173346	Schwarz criterion	-3.324048	
Log likelihood	173.7306	F-statistic	2.700269	
Durbin-Watson stat	0.393631	Prob(F-statistic)	0.050009	

Sumber : Hasil analisis dengan E-views

Dari hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.8 di atas maka dapat diperoleh fungsi regresi OLS sebagai berikut :

$$|U_i^2| = 0,021476 \ln M + 0,013520 \ln DPK + 0,005103 \text{ SBI}$$

Koefisien Modal Bank Umum dan Dana Pihak Ketiga menunjukkan bahwa parameter variabel ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga kesimpulannya variabel Modal Bank Umum dan Dana Pihak Ketiga tidak terdapat masalah heterokendastisitas. Koefisien suku bunga SBI menunjukkan bahwa parameter variabel ini signifikan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga terjadi heterokendastisitas.

(3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah adanya korelasi antar variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil. Dari tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikansi 0,05, dengan $k = 4$ dan $N = 99$ diperoleh nilai:

$$d_l = 1,59$$

$$d_u = 1,76$$

$$4-d_l = 2,41$$

$$4-d_u = 2,24$$

Hipotesisnya adalah nilai Durbin – Watson statistiknya 0,274998, sehingga berada didaerah autokorelasi positif yaitu dimana d yang ditaksir lebih kecil dari d_l yaitu $0 < 0,274998 < 1,59$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.

c. Interpretasi ekonomi

Model persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1) Pengaruh Variabel Modal Bank Umum Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan

Variabel Modal Bank Umum dengan nilai koefisien 0,447860 terbukti berpengaruh positif terhadap variabel Kredit Perbankan, pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien variabel modal mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan Modal Bank Umum sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan Kredit Perbankan sebesar 0,447860 persen, variabel lain konstan.

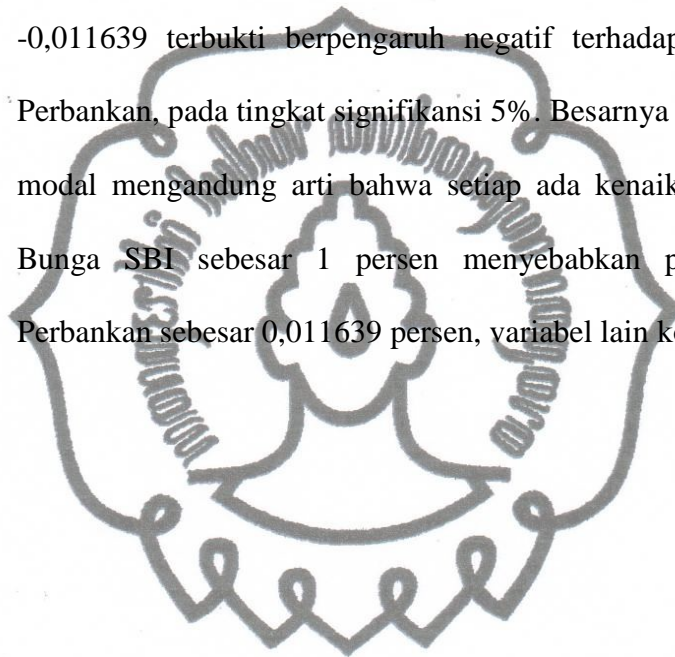
2) Pengaruh Variabel Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan

Variabel Dana Pihak Ketiga dengan nilai koefisien 1,242463 terbukti berpengaruh positif terhadap variabel Kredit Perbankan, pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien variabel modal mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan Dana Pihak

Ketiga sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan Kredit Perbankan sebesar 1,242463 persen, variabel lain konstan.

3) Pengaruh Variabel Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan

Variabel Tingkat Suku Bunga SBI dengan nilai koefisien -0,011639 terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel Kredit Perbankan, pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien variabel modal mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan Tingkat Suku Bunga SBI sebesar 1 persen menyebabkan penurunan Kredit Perbankan sebesar 0,011639 persen, variabel lain konstan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam meneliti pengaruh variabel modal bank umum, dana pihak ketiga, dan tingkat suku bunga SBI terhadap penyaluran kredit perbankan pada bank umum di Indonesia tahun 2001-2009 baik secara individual maupun secara bersama-sama dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada uji t, variabel independen yaitu modal bank umum, dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga SBI secara individual masing-masing variabel tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan pada tingkat signifikansi 5%.
2. Pada uji F, secara bersama-sama semua variabel independen yaitu modal, dana pihak ketiga, dan tingkat suku bunga SBI secara signifikan berpengaruh terhadap kredit perbankan pada tingkat signifikansi 5%.
3. Pengaruh variabel independen terhadap penyaluran kredit perbankan
 - a. Variabel Modal Bank Umum dengan nilai koefisien 0,447860 terbukti berpengaruh positif terhadap variabel Kredit Perbankan pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien variabel modal bank umum mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan Modal Bank Umum sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan Kredit Perbankan sebesar 0,447860 persen.

- b. Variabel Dana Pihak Ketiga dengan nilai koefisien 1,242463 terbukti berpengaruh positif terhadap variabel Kredit Perbankan, pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien variabel Dana Pihak Ketiga mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan Kredit Perbankan sebesar 1,242463 persen.
- c. Variabel Tingkat Suku Bunga SBI dengan nilai koefisien -0,011639 terbukti berpengaruh negatif terhadap variabel Kredit Perbankan, pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien variabel tingkat suku bunga SBI mengandung arti bahwa setiap ada kenaikan Tingkat Suku Bunga SBI sebesar 1 persen menyebabkan penurunan Kredit Perbankan sebesar -0,011639 persen.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa modal berpengaruh positif terhadap kredit perbankan. Modal merupakan penyokong utama operasional perbankan. Struktur modal perbankan yang kuat dapat menopang kredit dalam jangka panjang yang beresiko tinggi. Untuk itu perbankan diharapkan mampu memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang ketentuan pemenuhan modal minimum (KPMM) sebesar 8%. Untuk meningkatkan modal tersebut perbankan dapat meningkatkan

commit to user

profitabilitas dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang potensial sehingga kredit yang disalurkan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak macet. Dengan kondisi modal yang demikian perbankan cukup berhati-hati untuk menyalurkan kredit. Perbankan harus berani beralih dalam menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor yang prospektif seperti, sektor usaha kecil dan menengah yang potensial.

2. Dana pihak ketiga harus dijaga tetap naik agar ada kenaikan jumlah Kredit Perbankan. Agar dana pihak ketiga tetap naik perbankan dapat menawarkan produk-produk simpanan yang menarik minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dengan fasilitas dan kemudahan. Perbankan harus selalu kreatif dan inovatif didalam penawaran produknya karena sekarang ini banyak pesaing seperti reksadana yang memberikan kelebihan tersendiri. Saat ini perbankan mempunyai kapasitas cukup yang belum tersalurkan (dana pihak ketiga yang masih belum disalurkan dalam bentuk kredit). Untuk itu perbankan diharapkan dapat menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk kredit untuk mendukung berkembangnya sektor riil guna menunjang perekonomian nasional sehingga fungsi intermediasi bank dapat berjalan lancar.
3. Tingkat suku bunga SBI harus dijaga agar tetap rendah, tidak terlalu tinggi agar kredit perbankan dapat disalurkan ke masyarakat dalam jumlah cukup besar. Agar suku bunga SBI tetap rendah maka kondisi perekonomian harus tetap dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang stabil sehingga kepercayaan investor dan dunia usaha terjaga.

Penurunan suku bunga SBI tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi domestik dengan tetap menjaga kestabilan harga serta sistem keuangan dalam jangka menengah.

